

PROYEKSI STABILITAS SELAT TAIWAN PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN DONALD TRUMP

1

Rizki Roza¹ & Devindra Oktaviano²

Abstrak

Pada 29 November 2024 Amerika Serikat menyetujui transfer senjata senilai US\$385 juta untuk Taiwan. Persetujuan itu menarik perhatian karena memicu ketegangan antara AS dan Taiwan dengan China, terlebih AS akan memasuki era pemerintahan kedua Presiden Donald Trump. Tulisan ini menganalisis proyeksi stabilitas Selat Taiwan di era pemerintahan Presiden Trump. Dengan menelusuri rekam jejak kepemimpinan, janji kampanye, dan mencermati dinamika pembentukan kabinet Trump, tulisan ini memprediksi arah kebijakan luar negeri Trump terhadap kawasan Selat Taiwan. Meskipun Trump menggeser narasi solidaritas demokrasi ke arah pendekatan transaksional berbasis keuntungan bisnis dalam menyikapi isu Taiwan, potensi stabilitas yang memburuk di Selat Taiwan tetap ada. Keterlibatan negara besar, proliferasi senjata canggih, dan hubungan dagang yang intensif akan membuat setiap konflik yang terjadi di Selat Taiwan berimplikasi sangat serius pada keamanan dan kemakmuran kawasan, termasuk Indonesia. Komisi I DPR RI perlu mendorong pemerintah berkontribusi menjaga stabilitas kawasan dan mendorong dialog di antara para pihak yang berkepentingan.

Pendahuluan

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) baru saja menyetujui penjualan dua paket senjata dengan total nilai US\$385 juta kepada Taiwan pada 29 November 2024. Defence Security Cooperation Agency (DSCA) Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menerangkan paket

penjualan terdiri atas suku cadang dan layanan dukungan untuk pesawat tempur F-16, sistem radar AESA (*Active Electronically Scanned Array*), serta peralatan dan dukungan untuk sistem komunikasi taktis (Shakil, 2024).

China mengecam keras keputusan AS yang dianggap meremehkan kedaulatan dan

¹ Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Polhukam, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e mail: rizki.roza@dpr.go.id.

² Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Polhukam, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e mail: devin.oktaviano@dpr.go.id.



9 772088 235001

integritas wilayahnya. Pada 5 Desember 2024, China mengeluarkan sanksi kepada 13 badan usaha dan enam pejabat eksekutif dari lima badan usaha pertahanan asal AS (Lee, 2024). Ketegangan ini mengemuka di tengah tren meningkat tajamnya kampanye militer China di Selat Taiwan, terutama sejak disetujuinya sejumlah paket transfer senjata dari AS ke Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Presiden terpilih Donald Trump akan mulai menjabat pada 20 Januari 2025 dan telah membentuk rancangan kabinet.

Keterlibatan negara besar, proliferasi senjata canggih, dan hubungan dagang yang intensif akan membuat setiap konflik yang meletus di Selat Taiwan berimplikasi sangat serius pada keamanan dan kemakmuran kawasan, termasuk Indonesia. Tulisan ini menguraikan proyeksi stabilitas keamanan Selat Taiwan di masa pemerintahan kedua Donald Trump, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Komisi I untuk mendorong pemerintah turut berkontribusi menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Pembangunan Kekuatan Militer Taiwan

Taiwan mengklaim diri sebagai negara demokrasi berdaulat yang berhak mempertahankan wilayah, termasuk menggunakan kekuatan militer. Taiwan menyiagakan persenjataan canggih untuk menghadapi skenario serangan amfibi (pendaratan pasukan yang didahului gempuran via laut dan udara) dengan tank Abrams, rudal patriot, dan jet tempur F-16. Pada awal Agustus 2024 Presiden Lai Ching-

Te menyampaikan kenaikan 6% nominal belanja pertahanan untuk tahun 2025 menjadi 657 miliar dolar Taiwan (US\$19,74 miliar) atau setara 2,5% GDP (Lee, 2024). Presiden sebelumnya, Tsai Ing-Wen, memperpanjang masa wajib militer dari empat bulan menjadi satu tahun, membangun kapal selam secara mandiri di dalam negeri, membangun kapabilitas untuk melaksanakan perang asimetris, dan menata ulang pasukan cadangan (Sacks, 2024). Taiwan juga rutin menggelar latihan kesiapan tempur, baik mandiri maupun bersama negara lain.

Konsistensi China menegaskan kedaulatannya atas Taiwan diikuti dengan upaya Presiden Xi Jinping menyiapkan sedemikian rupa kapabilitas militer untuk menaklukkan Taiwan. Manuver militer China juga kian agresif dan provokatif di Selat Taiwan. Pada akhir Oktober 2024, China menggelar latihan perang yang kedua kalinya dengan mengerahkan 153 pesawat, 14 kapal, dan 12 kapal pemerintah ke Selat Taiwan. Pada 9 Desember 2024, Taiwan meningkatkan status kewaspadaan menjadi "tinggi" pasca China mengerahkan hampir 90 kapal perang dan kapal penjaga pantai ke perairan sekitar Taiwan serta memberlakukan pembatasan pada ruang udara di atas perairan tersebut (Al Jazeera, 2024).

Upaya Taiwan meningkatkan kekuatan militer yang selalu direspon serupa oleh China, merupakan tantangan serius bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Konflik di Selat Taiwan dapat menimbulkan dampak lebih besar bagi Indonesia daripada

perang Rusia-Ukraina. Selain karena kedekatan geografis, baik Taiwan, Amerika Serikat, maupun China merupakan mitra dagang utama Indonesia. Di samping itu, hampir 300 ribu WNI berada di Taiwan.

Proyeksi Kebijakan Donald Trump

Kebijakan politik luar negeri AS terhadap Taiwan selama lebih dari empat dekade terakhir dilandaskan pada kesepakatan the Three Joint Communiques (1972, 1979, 1982) antara AS dengan China, Taiwan Relations Act (TRA) tahun 1979, dan the Six Assurances tahun 1982. Ketiga dokumen tersebut menjadi landasan bagi AS untuk tetap memelihara hubungan ekonomi, keamanan, dan budaya dengan Taiwan meskipun AS tidak memberikan pengakuan diplomatik (*de jure*) kepada Taiwan (*One China Policy*). TRA menjadi dasar bagi AS untuk menyediakan senjata dan layanan pertahanan yang bersifat defensif agar Taiwan mandiri mempertahankan negaranya (Yuan, 2023).

Kondisi di atas menjadikan AS konsisten sebagai penyuplai persenjataan terbesar bagi Taiwan sejak tahun 1979. Nilai transfer senjata AS ke Taiwan yang tertinggi hingga tahun 2024 terjadi pada masa pemerintahan Presiden Trump tahun 2016-2020 yang mencapai US\$15 miliar. Trump merestui sebelas paket penjualan di antaranya 66 unit pesawat tempur F-16 V, drone, dan peluru kendali. Nilai ini bahkan lebih besar dari total nilai transfer senjata selama 8 tahun masa pemerintahan Obama yang mencapai US\$14 Miliar. Diplomasi pertahanan keduanya juga meliputi konsultasi pertahanan rutin, pelatihan perwira militer Taiwan

di lembaga militer AS, partisipasi personel militer AS dalam latihan militer Taiwan, dan pelatihan yang berkenaan dengan pengadaan senjata (Yuan 2023). Meskipun hubungan keamanan keduanya begitu erat, AS tidak menempatkan satu aset militer pun di Taiwan.

Pada 25 Oktober 2024, pemerintahan Biden menyetujui penjualan senjata kepada Taiwan yang terdiri atas paket National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) senilai US\$1,16 miliar dan sistem radar senilai US\$828 juta. NASAMS sudah teruji pada perang Rusia-Ukraina dan Taiwan untuk pertama kalinya mendapatkan transfer NASAMS tersebut. AS berkali-kali juga menggerakkan kapal perang dan jet tempurnya untuk melewati Selat Taiwan seperti yang terakhir digelar pada 26 November 2024 (Tempo, 2024).

Rekam jejak kebijakan dan pernyataan lisan menunjukkan Donald Trump memiliki pendekatan politik luar negeri yang transaksional, menekankan nilai bisnis (Casado, 2024) dan mengutamakan forum bilateral, termasuk dalam hal hubungan diplomatik dengan Taiwan. Selama masa kampanye pemilihan presiden tahun ini, pernyataan Trump tentang Taiwan tampak kontraproduktif dengan apa yang sudah dilaksanakan Biden. Pertama, Trump memaksa Taiwan mengalokasikan hingga 10% dari GDP-nya untuk pertahanan. Kedua, Trump mengatakan, Taiwan harus membayar biaya jaminan perlindungan kepada AS layaknya klien membayar premi kepada perusahaan asuransi (CNA, 2024). Ketiga, dalam podcast The Joe Rogan Experience, Trump menuduh Taiwan mencuri industri semikonduktor AS dan mengancam akan mengenakan bea

masuk atas chip dari Taiwan. Trump mengkritik CHIPS and Science Act era Biden yang menjadi dasar hukum pengucuran insentif keuangan kepada perusahaan teknologi semikonduktor yang ingin membangun pabrik di AS. Perusahaan semikonduktor asal Taiwan, TSMC merupakan salah satu yang menikmati insentif kebijakan ini (CNBC Indonesia, 2024). Keempat, dalam The Wall Street Journal yang dikutip Business Insider, Trump mengatakan bahwa ia “*wouldn’t have to* (tidak harus)” menggunakan militer AS untuk mempertahankan Taiwan karena ia menganggap Xi Jinping menghormati dirinya (Loh et.al, 2024).

Trump yang tidak tertarik pada narasi solidaritas demokrasi, tampaknya tidak akan bersedia menggelontorkan lebih banyak sumber daya AS untuk Taiwan. Kendati demikian, tensi politik kawasan Selat Taiwan tidak akan menurun begitu saja. Berkaca pada pemerintahan pertamanya, Trump bisa saja justru meningkatkan dukungan militernya kepada Taiwan sebagai ganti peningkatan nilai transaksi senjata yang akan menguntungkan industri pertahanan AS meskipun dengan kompensasi tekanan pengeluaran untuk belanja pertahanan yang semakin meningkat di Taiwan (Satake, 2024).

Pada masa persiapan jelang pelantikan, Trump justru menunjuk banyak kandidat menteri yang memiliki pandangan keras terhadap China. Calon Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, ketika menjabat Senator pada tahun 2023, pernah mengusulkan RUU “Taiwan Peace Through Strength Act”. Sementara itu, calon Penasehat Keamanan Nasional, Michael Waltz, ketika berada di US House of Representative mendorong pemerintah AS agar Taiwan lebih cepat dipersenjatai untuk menangkal China

(Casado, 2024). Jadi, meskipun Trump mungkin mengendorkan kedekatan bilateral dengan Taiwan, tetapi kebijakannya yang berpotensi semakin keras dengan China tetap dapat berdampak pada eskalasi ketegangan di Selat Taiwan.

Penutup

Dinamika stabilitas keamanan Selat Taiwan tetap akan berimplikasi serius pada keamanan dan kemakmuran Indonesia. Mengacu pada janji kampanye dan dinamika jelang pelantikannya, selat Taiwan masih berpotensi memanas pada masa pemerintahan kedua Presiden terpilih Donald Trump.

Komisi I DPR RI perlu mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar berkontribusi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Selat Taiwan dengan mengingatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menahan diri dan mengedepankan dialog. Komisi I DPR RI juga dapat merekomendasikan Kemlu dan Kementerian Pertahanan untuk menyiapkan rencana kontijensi guna merespons situasi jika ketegangan di Taiwan berubah menjadi konflik bersenjata terbuka. Melalui diplomasi parlemen, DPR RI juga dapat memberikan pendekatan *second-track diplomacy* untuk turut berkontribusi meredakan ketegangan di Selat Taiwan.

Referensi

- Casado, J. A. R. (2024. November 18). Trump 2.0 and the future of the Taiwan Strait lonfict. *thediplomat.com*. <https://thediplomat.com/2024/11/trumps-return-and-the-future-of-the-taiwan-strait-conflict/>

- Donald Trump tuduh Taiwan pencuri, tebar ancaman jika menang. (2024, Oktober 29). <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241029091013-37-583799/donald-trump-tuduh-taiwan-pencuri-tebar-ancaman-jika-menang>
- Jet tempur patroli Angkatan Laut Amerika Serikat lewati Selat Taiwan. (2024, November 26). <https://www.tempo.co/internasional/jet-tempur-patroli-angkatan-laut-amerika-serikat-lewati-selat-taiwan--1173430>
- Lee, L. & Cao, E. (2024, Desember 5). China slaps sanctions on 13 US military firms over Taiwan arms sale. *reuters.com*. <https://www.reuters.com/world/china-slaps-sanctions-13-us-military-firms-over-taiwan-arms-sale-2024-12-05/>
- Lee, Y. (2024, Agustus 6). Taiwan's defence budget will hit new record next year, president says. *reuters.com*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwans-2025-defence-budget-reach-new-high-1974-bln-president-says-2024-08-06/>
- Loh, M., Tan, K. W. K., & Teh C. (2024, November 9). Trump said Taiwan should pay for US protection. Here's what a second Trump term could mean for the island. *businessinsider.com*. <https://www.businessinsider.com/what-second-trump-term-could-mean-for-taiwan-2024-11>
- Sacks, D. (2024, Agustus 9). Taiwan's latest Defense Budget risks falling further behind China. *cfr.org*. <https://www.cfr.org/blog/taiwans-latest-defense-budget-risks-falling-further-behind-china>
- Satake, H. (2024, Desember 3). Trump puts Taiwan on the tightrope. *eastasiaforum.org*. <https://eastasiaforum.org/2024/12/03/trump-puts-taiwan-on-the-tightrope/>
- Shakil, I. (2024, November 30). US approves \$385 mln arms sale to Taiwan. *reuters.com*. <https://www.reuters.com/world/us-state-dept-approves-potential-sale-f-16-spare-parts-taiwan-pentagon-says-2024-11-30/>
- Taiwan's Lai says 'confident' of deeper cooperation with Trump. (2024, Desember 6). <http://www.channelnewsasia.com/east-asia/taiwan-lai-ching-te-visits-palau-china-fumes-pacific-tour-4790741>
- Taiwan raises alert to 'high' amid presence of Chinese warships. (2024, Desember 9). <https://www.aljazeera.com/news/2024/12/9/taiwan-raises-alert-to-high-amid-presence-of-chinese-warships>
- Yuan, J. (2023). The United States and stability in the Taiwan Strait. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 79(2), 80–86. <https://doi.org/10.1080/00963402.2023.2178176>

Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian DPR RI
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.